

## **STUDI GEOPOLITIK LAUT CHINA SELATAN: DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL (GEOPOLITICAL STUDIES OF THE SOUTH CHINA SEA: DATA AND ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA)**

Amaliana Nur Fajrina<sup>1</sup>, Ali Roziqin<sup>2</sup>, Iradhad Taqwa Sihidi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas  
Muhammadiyah Malang  
Email: [aliroziqin@umm.ac.id](mailto:aliroziqin@umm.ac.id)

**ABSTRAK:** Perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untuk didiskusikan oleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, serta pengaruh kekuatan Amerika dan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan dari perspektif masyarakat berdasarkan data dan analisis sosial media serta posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Data dan analisis sosial media (twitter) diperoleh melalui Drone Emprit pada periode 7-25 juni 2020. Hasilnya adalah diskusi dan perbincangan tentang isu Laut China Selatan dengan Social Network Analysis India, Hongkong, Australia dan Taiwan merupakan Negara yang paling terlibat dalam isu ini. Sedangkan, posisi Indonesia pada isu Laut China Selatan tetap berpegang pada politik bebas aktif dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku (UNCLOS 1982) dibuktikan dengan beberapa cuitan seperti menolak negoisasi dengan Beijing; menutup ruang negosiasi; dan menolak 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China. Isu konflik Laut Cina Selatan ini lebih banyak dibicarakan dari kalangan Babyboomers dan hanya sedikit dari gen X-Y. Implikasi studi menjelaskan bahwa Indonesia sangat menekankan upaya diplomatis dalam isu geopolitik yang tengah memanas di Laut China Selatan.

**Kata Kunci:** Geopolitik, Laut Cina Selatan, Drone Emprit, Indonesia

**ABSTRACT:** *The power struggles in the South China Sea region has become an important to discussed by the public. Several countries in ASEAN such as Indonesia, as well as the influence of American and China's forces are fighting over each other in strategic areas for sea trade routes and abundant potential resources. This study aims to analyze the geopolitical phenomena in the South China Sea region from the perspective of the community based on data and social media analysis, besides Indonesia's position in the conflict. Data and analysis on social media (twitter) were obtained through Drone Emprit on the period 7-25 June 2020. The result was discussion and conversation on the issue of the South China Sea with Social Network Analysis India, Hong Kong, Australia and Taiwan were the countries most involved in this issue. Whereas, Indonesia's position on the issue of the South China Sea still adheres to free and active politics and upholds the principles of applicable law (UNCLOS 1982) as evidenced by several tweets such as rejecting negotiations with Beijing; close the negotiation room; and rejects the 9 dotted lines claimed by China. The issue of the South China Sea conflict is more widely discussed among Babyboomers and only a few of the X-Y genes. The implications of the study explain that Indonesia places great emphasis on diplomatic efforts on the geopolitical issues that are heating up in the South China Sea.*

**Keywords:** *Geopolitics, The South China Sea, Drone Emprit, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini situasi geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan kembali memanas. Beberapa Negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan saling berebut terhadap daerah yang mempunyai potensi sumber daya melimpah. Geopolitik yang terjadi di Laut Cina Selatan muncul ketika China mengklaim *Nine-Dash Line* (Garis Putus-Putus) masuk ke dalam wilayah Negara di peta resmi China (Vujakovic, 2020). Hal ini menyebabkan ketegangan di wilayah ASEAN (Fathun, 2017) dan intervensi US (Amerika) terhadap Jepang dalam konflik laut Cina Selatan menambah ketegangan di kawasan tersebut.

Klaim China atas Laut Cina Selatan digunakan sebagai daya dukung dalam mengembangkan pendapatan dan perekonomian Negara (Putri, 2012). Kawasan tersebut menyimpan warisan bawah laut yang besar atau disebut dengan *Underwater Cultural Heritage* dan China berencana membangun jalur sutera maritime atau "*21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*" (Li & Chang, 2019). Klaim China tersebut menyebabkan Laut Cina Selatan menjadi inti dari perselisihan kedaulatan dan wilayah selama beberapa dekade karena sifat geopolitiknya yang kompleks dan historis (Perez-Alvaro & Forrest, 2018). Sehingga, inti permasalahannya mencakup dua hal yaitu kedaulatan teritorial dan maritime (Junef, 2018).

Perebutan kekuasaan dan upaya konfrontasi diantara Negara-negara yang

berkepentingan di wilayah Laut Cina Selatan telah mengganggu situasi politik dan keamanan di wilayah ASEAN secara khusus, sekalipun terhadap Negara-negara yang tidak berkepentingan seperti Indonesia (Junef, 2018). Dinamika geopolitik yang terjadi berdampak pada perang terbuka para pejabat publik dalam memberikan pernyataan dan komentar di media atau melalui sosial media. Disamping itu, isu laut Cina Selatan juga telah menyita atensi masyarakat untuk ikut memberikan komentar terhadap situasi ini di sosial media seperti twitter.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya penggunaan internet telah merubah komunikasi online dalam ruang public (Mainka et al., 2014). Diantara perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) adalah sosial media yang telah didefinisikan sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial (Haro-de-Rosario et al., 2018). Masyarakat lebih cenderung mengikuti sebuah isu melalui sosial media dari pada media lain, yang mana dibuktikan dalam studi Kim, Chun, Kwak, & Nam (2014) yang menyatakan bahwa beberapa karakter utama sosial media adalah partisipasi, percakapan dan saling berkaitan.

Dalam studi Haro-de-Rosario, Sáez-Martín, & del Carmen Caba-Pérez (2018) menjelaskan bahwa terdapat 255 juta pengguna twitter dengan rata-rata 360.000

tweets per menit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengguna aktif harian mencapai 166 juta (Jati, 2020). Tren ini mengubah sosial media menjadi ruang publik yang bebas (Suharso, 2019). Masyarakat dari semua kalangan bisa berinteraksi, bertukar ide, menyampaikan gagasan dan mendiskusikan isu yang menyangkut kehidupan bersama, termasuk isu laut China Selatan.

Sementara beberapa studi tentang geopolitik di Laut China Selatan telah banyak dilakukan. Seperti misalnya studi oleh Huang & Suliman (2020) yang berusaha mengaitkan geopolitik teritorial Laut China Selatan dengan pariwisata. Selanjutnya, studi geopolitik tentang *China's Maritime Silk Road*, dimana salah satu jalur yang menjadi rute adalah Laut China Selatan (Blanchard & Flint, 2017). Sedangkan dalam studi Hayton (2019) menjelaskan munculnya geopolitik di wilayah Laut China Selatan adalah karena kepercayaan sebagian besar masyarakat China yang meyakini bahwa Laut China Selatan adalah warisan historis. Salah satu artikel yang hampir mirip dengan subjek analisis adalah studi dari Vujakovic (2020) yang menjelaskan bahwa klaim China atas Laut China Selatan telah membentuk opini di media-media barat dalam menyebarkan isu geopolitik dan konflik yang terjadi disana. Dari beberapa studi yang telah dijelaskan diatas, belum ada artikel yang membahas tentang studi geopolitik dengan pendekatan analisis sosial media, sehingga fenomena ini menarik ini untuk dikaji.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena geopolitik pada sosial media twitter. Fenomena ini menarik dan menjadi perhatian bagi para pejabat public dan masyarakat di twitter, terlebih lagi mengenai posisi Indonesia dan peran serta menjaga kondusivitas wilayah kawasan. Pada sub judul pertama penulis berusaha menjelaskan sejarah munculnya geopolitik Laut China Selatan dan dinamikanya secara ringkas. Sub judul kedua, penulis menjelaskan analisis dari sosial media twitter terkait dengan isu Laut China Selatan dalam periode tertentu. Sub judul ketiga, menjelaskan peran dan posisi Indonesia dalam geopolitik Laut China Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Studi geopolitik muncul sebagai sebuah studi adalah pasca perang dunia kedua (Hochberg & Sloan, 2017). Dua kutub kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan USA (United States of America) telah mendominasi dinamika global sampai berakhirnya perang dunia ke dua. Namun pasca perang dunia kedua, dimana ditandai dengan runtuhnya kekuatan Unisoviet, Amerika seperti menjadi menjadi pemain tunggal dalam beberapa strategi global dan konflik perebutan sumber daya selama perang dingin. Hingga pada awal 2000-an muncul kekuatan baru dalam perekonomian global yaitu China.

Geopolitik dapat diartikan sebagai

kombinasi praktik dan representasi yang merubah lingkungan dan ruang organisasi politik dan bagaimana pembedaan bagian-bagian dunia dengan pelabelan (Blanchard & Flint, 2017). Menurut kamus *The Penguin Dictionary of International Relations*, geopolitik dimaknai sebagai sebuah metode untuk mempelajari politik luar negeri suatu Negara melalui variable seperti tempat, demografi, sumber daya, alam, iklim, dan lain-lain (Gonggong, 2017). Sementara menurut Suradinata (2001) geopolitik didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan faktor-faktor seperti geografi, strategi dan politik sebagai sebuah strategi nasional.

Situasi memanas yang terjadi di Laut China Selatan tidak lain juga di karenakan oleh terbenturnya geopolitik satu Negara dengan yang lainnya. Sifat geopolitik yang kontekstual seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kedaulatan dan kemandirian Negara. Dinamika geopolitik Laut China Selatan yang dikelilingi oleh banyak Negara melahirkan konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan antar Negara dalam politik internasional. Mengacu pada berbagai konteks global dan dinamika yang terjadi, geopolitik global lebih banyak dimainkan oleh Negara adidaya. Pola ini lebih dikarenakan perebutan sumber daya dan potensi ekonomi suatu wilayah.

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan merujuk pada keberadaan dua kepulauan yaitu Paracel dan Spratly (Roza et al., 2013). Negara-negara yang berkonflik pada umumnya menggunakan sisi historis dan geografis yang diakui

oleh Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Seperti misalnya China yang mempercayai bahwa Laut China Selatan merupakan warisan sejak 2000 tahun yang lalu (Hayton, 2019). Selanjutnya pemerintah China mengklaim dan telah mengeluarkan peta teritorial yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan pada tahun 1947 atau sering dikenal dengan *Nine Dashed Line* (Garis Putus-Putus) (Zhao, 2018).

Meskipun dalam beberapa kasus China kalah secara *de jure* dengan Negara yang berkonflik seperti Filipina (Hsiao, 2017). Namun, semenjak resesi global yang terjadi tahun 2008, China bertransformasi sebagai kekuatan global dan ikut aktif dalam geopolitik global. Termasuk upaya konfrontasi secara nyata yang jelas melanggar Konvensi Hukum Laut Internasional. Bahkan, kemenangan Filipina atas kasus tersebut tidak membuat China mengakui keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional dan kenaikan status perekonomian China di mata dunia malah menjadikan mereka semakin merasa kuat akan kepemilikan Laut China Selatan, salah satunya dengan menyuarkan *maritime silk road* sebagai salah satu solusi perekonomian Asia, karena kekayaan alam dan jalur strategis pelayaran internasional yang berada di Laut China Selatan (Blanchard & Flint, 2017). Studi mengenai geopolitik Laut China Selatan yang menjadi semakin dinamis ini kemudian banyak

menyita perhatian para *scholars* dan *policymakers* untuk berdiskusi dan mengaitkan hal tersebut ke dalam berbagai macam aspek, seperti potensi pariwisata dan proyek politik-ekonomi yang sarat malapetaka dan erat kaitannya dengan konsekuensi batas teritorial antar negara (Huang & Suliman, 2020).

Berikutnya, bagaimana dengan posisi Indonesia dalam isu Laut China Selatan? Indonesia bukan Negara pengklaim yang memiliki kepentingan, namun saling klaim antar Negara terutama China, mengganggu keamanan dan kedaulatan di wilayah kepulauan Natuna (Roza et al., 2013). Dengan situasi dan kondisi yang belum dapat tertangani hingga saat ini mengharuskan Indonesia untuk terus mempertahankan ketahanan nasionalnya dengan berusaha untuk memahami jati diri dan potensi bangsa (Suradinata, 2001). Salah satunya dengan geopolitik Indonesia atau yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara yang memiliki tujuan untuk menciptakan persatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus menjalankan amanah Undang-Undang 1945 untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hal tersebut dilakukan melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan social media yang mana dalam hal ini adalah twitter. Penulis menggunakan Social

Network Analysis yang telah disajikan dalam Drone Emprit. Sebuah website dari Universitas Islam Indonesia yang menampilkan data dan analisis sosial media berdasarkan beberapa isu menarik di masyarakat dengan *Artificial Intelligence* (AI).

Penulis juga mencari rujukan artikel google scholar dengan kata kunci geopolitik dan Laut China Selatan dalam berbagai macam perspektif. Disamping itu penulis menganalisis permasalahan menggunakan rujukan dari beberapa artikel jurnal yang terbit dari Taylor and Francis, Sage, dan Scindirect yang memiliki relevansi dengan studi ini. Selanjutnya penulis menganalisis fakta-fakta yang didapatkan dari beberapa media berita online untuk menambah elaborasi dan penjelasan dari temuan-temuan yang disajikan dalam analisis data drone emprit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Panjang Geopolitik Laut China Selatan**

Laut Cina Selatan merupakan sebuah kawasan perairan dan gugusan kepulauan yang terdiri dari dua Pulau besar yaitu Spratly dan Paracels. Luas dari kawasan ini membentang melewati beberapa Negara, mulai dari Selat Malaka (Singapura) sampai ke Selat Taiwan (Nainggolan, 2013). Kawasan ini memiliki 3,5 juta kilometer persegi dan sumberdayanya diperebutkan oleh beberapa Negara termasuk

China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia (Gau, 2012; Vujakovic, 2020). Meskipun Indonesia bukan Negara yang aktif untuk saling klaim, artinya hanya menjaga kedaulatan wilayahnya dari klaim dari Negara lain.

Perebutan kawasan ini telah berlangsung sejak lama dan menyimpan sisi historis dari masing-masing Negara yang saling klaim. Misalnya saja Filipina yang melaporkan pelanggaran kapal China wilayah perairannya. Kemudian Vietnam dengan China. Manuver yang dilakukan oleh China tidak lain karena keyakinan mereka atas kepemilikan Laut China Selatan sebagai sebuah warisan (Hayton, 2019) serta ambisi mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan memanfaatkan Laut China Selatan yang menyimpan berjuta potensi. Disisi lain Negara-negara seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat juga tidak tinggal diam untuk menguasai wilayah Laut China Selatan yang dapat memberikan manfaat besar dalam ekonomi suatu Negara (Junef, 2018).

Selanjutnya bagaimana konflik dengan Indonesia? Laut China Selatan sudah menjadi konflik sejak lama dan keterlibatan Indonesia dengan konflik kawasan Laut China Selatan dimulai sejak terbitnya *Peta Baru* Malaysia pada Desember 1979 yang melibatkan Pulau Sipadan-Ligitan (Maksum, 2017), yang kemudian berlanjut dengan munculnya klaim mutlak China pada tahun 2012 atas kepemilikan seluruh wilayah perairan baik kepulauan maupun pulau dikawasan Laut China Selatan (Roza et al., 2013), yang kemudian dirasa

akan mengancam kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia terutama pada stabilitas kawasan laut Natuna dan perdagangan internasional.

Meskipun Indonesia bertindak sebagai *Non-Claimant State*, namun posisi Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN yang juga memiliki tujuan negara untuk ikut berperan aktif dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 mengharuskan Indonesia untuk mengambil peran sebagai penyeimbang, dan pereda penyelesaian konflik, terutama pada kawasan konflik Laut China Selatan (Saragih, 2018), yang dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan asosiasi maupun forum-forum seperti *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea, Declaration of Conduct, Code of Conduct in the South China Sea*, dan lain sebagainya.

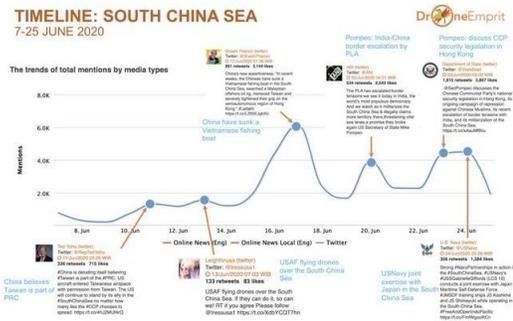
Namun, dalam kenyataannya kurangnya sikap kooperatif pada beberapa negara disekitar kawasan Laut China Selatan mengakibatkan sulitnya menyatukan persepsi nasional dan kepentingan bersama, yang kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antar negara-negara tersebut (Bai & Hu, 2016). Sehingga, geopolitik, kepentingan negara, dan identitas nasional akan sulit dicapai, karena mengingat bahwa geopolitik

merupakan suatu ilmu yang menggabungkan analisis dan pengaturan geografis terhadap politik, ekonomi, militer, dan budaya kondisi suatu negara untuk mengembangkan dan melaksanakan kepentingan (Mitchell, 2016), yang kemudian dapat menjadi tantangan atau keuntungan bagi negara yang berusaha untuk mengamankan daerah tertentu untuk diri sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan suatu wilayah yang dibatasi oleh pengaturan.

## 2. Analisis Sosial Media Laut China Selatan

Pada tahun 2020, situasi di Laut China Selatan kembali memanas, Negara-negara yang mempunyai kepentingan saling bermanuver dan perang terbuka secara public. Meskipun skala konfliknya masih rendah (*low intensity conflict*) namun tetap berpeluang menjadi konflik skala tinggi (*high intensity conflict*) jika hal ini dibiarkan terus menerus. Walaupun secara *de jure* sudah jelas pengaturan-pengaturan internasional tentang Laut China Selatan.

Data analisis yang telah disajikan di website drone emprit ini adalah kumpulan tweets dari periode 7-25 Juni 2020. Tweet-tweet yang dikeluarkan oleh pejabat public, media, media official instansi pemerintah dan lembaga intelijen dari beberapa Negara yang berkepentingan terangkum dalam timeline dibawah ini:



Sumber: diambil dari Drone Emprit

Berdasarkan tersebut ada beberapa catatan penting yang mewarnai dinamika konflik terbuka di Laut China Selatan. Pertama, China menganggap Taiwan bagian dari RRC. Sejarah panjang dua Negara serumpun ini semakin mempertajam konflik keduanya. Hal itu diikuti penguatan militer Taiwan untuk menegaskan kedaulatannya di Laut China Selatan (Arbar, 2020). Kedua, USAF (*United States Air Force*) menerbangkan drone di Laut China Selatan membuktikan kepentingan atau Intervensi Amerika dalam wilayah tersebut. Ketiga, China menenggelamkan kapal ikan Vietnam. Keempat, US Navy Latihan gabungan dengan Jepang di Laut China Selatan. Kelima, Menteri Luar Negeri secara terbuka menantang China dengan melakukan kerjasama dengan India. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan AS mengenai UU keamanan di Hongkong.

Seperti yang telah kita saksikan bersama, bahwa dalam beberapa dekade terakhir kapasitas dan kemajuan angkatan laut serta udara yang dimiliki oleh China semakin

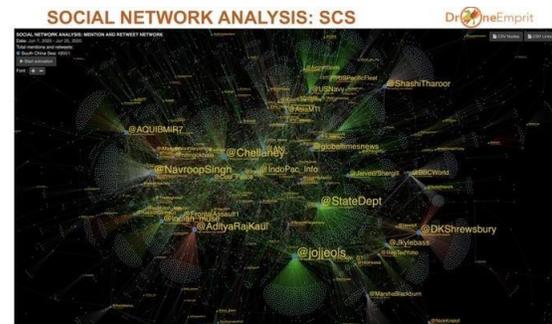


terdeteksi terbang sejak pertengahan juni di kawasan perairan Laut China Selatan.

Adanya peningkatan aktivitas militer yang dilakukan Amerika Serikat di titik masuk timur kawasan Laut China Selatan dan sekitarnya ini kemudian membuat China menuduh bahwa Amerika merupakan aktor yang meningkatkan dan menabur acaman serta perselisihan diantara negara-negara disekitar Laut China Selatan (Rafie, 2020). Namun, *press statement* yang dikeluarkan Michael R. Pompeo sebagai sekretaris negara menyatakan bahwa posisi Amerika mengenai klaim maritim Laut China Selatan lagi-lagi hanyalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, serta menegakkan kebebasan laut yang sesuai dengan hukum internasional. Bahkan Michael R. Pompeo berpendapat bahwa dunia pun tidak akan mengizinkan jika Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya, dan meyakini bahwa Amerika bersama sekutu dan mitra Asia Tenggara serta komunitas internasional akan melindungi hak kedaulatan atas sumber daya lepas pantai sebagaimana hak dan kewajiban yang tertera dibawah hukum internasional (U.S Department of State, 2020).

Ketegangan secara fisik antara Negara yang berkepentingan diikuti di media daring. Pergerakan yang semakin meruncing di jagat social media tentang isu Laut China Selatan telah banyak menyita atensi masyarakat terutama akun dengan jumlah follower banyak. Namun berdasarkan *Social*

*Network Analysis* yang diambil dari Drone Emprit menjelaskan bahwa India dan USA banyak mendiskusikannya di Twitter (Lihat SNA Laut China Selatan)



Sumber: diambil dari Drone Emprit

Ramainya diskusi netizen (warga di sosial media) Bermula dari berbarengannya latihan militer yang dilakukan United State dan China dikawasan Laut China Selatan kemudian menimbulkan gurauan di Twitter mengenai persaingan strategis yang semakin dalam dan terbuka oleh China dan US (Hindustan Times, 2020). Bahkan, angkatan laut dan media China saling bertukar Hashtag di Twitter yang mengakibatkan saling sindir dengan memperlihatkan kekuatan para armadanya.

Dilain sisi, memanasnya perang perebutan wilayah Laut China Selatan yang terjadi di Twitter juga dimulai sejak munculnya klaim sepihak China atas 90% wilayah Laut China Selatan, yang menimbulkan penolakan dari dari *United State*. Melihat hal tersebut, kemudian Duta Besar Australia O'Farrel yang bertugas di India menyampaikan rasa prihatin negaranya atas perilaku agresif yang dikeluarkan Beijing di Laut China selatan yang

dirasa akan mengganggu stabilitas dan memicu eskalasi ketegangan wilayah, melalui kicauannya di Twitter tersebut kemudian memancing Sun Weidong selaku Duta Besar China di India untuk ikut buka suara dalam perdebatan sengit (CNN Indonesia, 2020b), dan berharap agar US dan Australia yang tidak memiliki permasalahan di Laut China Selatan untuk tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut China Selatan.

Bahkan, seminggu sebelum perdebatan China dan Australia ini terjadi, China sudah lebih dulu terlibat perdebatan dengan Komisaris Inggris di India, Philip Barton karena pernyataannya atas tindakan yang dilakukan China (Chaudhury, 2020). Namun, Sun Weidong tetap bersikukuh bahwa permasalahan Laut China Selatan ini tidak membutuhkan pihak ketiga, yang dianggapnya sebagai tantangan nyata dari kekuatan luar kawasan Laut China Selatan yang malah memperkeruh sengketa teritorial dan perdamaian.

Hong Kong, Austalia, dan Taiwan. Seperti misalnya Taiwan yang menjadi pihak ketiga dari perselisihan China dengan Filipina. Kemudian hal ini tentu akan berimplikasi secara politik bagi Taiwan (Hsiao, 2017).

**MOST RETWEETED: SCS (1-5)**

Rank	User	Status	#Followers	#Retweeted	All Time
1	Jagje Dason @JagjeDason	As a European, I feel there is something odd with this article, that in between the lines reads: "You can run concentration camps, swallow Hong Kong, absorb Taiwan and occupy the South China Sea, as long as German companies are granted good market access". #HKS-1 (Link in bio)	10,100	1,947	1,231
2	Department of State @StateDept	@SecPompeo discusses the Chinese Communist Party's national security legislation in Hong Kong, its ongoing campaign of repression against Chinese Muslims, its recent escalation of border tensions with India, and its militarization of the South China Sea. #HKS-1 (Link in bio)	6,862,039	1,602	3,866
3	Navroop Singh @NavroopSingh_	Meanwhile all three American Aircraft carriers in Pacific are now deployed in South China Sea near Taiwan with Nuclear Bombers awaiting the same.	28,008	1,222	1,300
4	Shashi Tharoor @ShashiTharoor	China's new assertiveness: "In recent weeks, the Chinese have sunk a Vietnamese fishing boat in the South China Sea, swarmed a Malaysian shipload of oil, increased Taiwan and severely tightened their grip on the semi-autonomous region of Hong Kong." #Ludak #HKS-1 (Link in bio)	7,595,472	750	891
5	Aqash Mir 77 @AQashMir77	China has perhaps lost a friend like India just for a few tactical benefits gains. If they have to face India 1/2 turns on important issues like Tibet, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea, trade and Taiwan in the near term. #InAgree #HKS-1 (Link in bio)	40,888	750	890

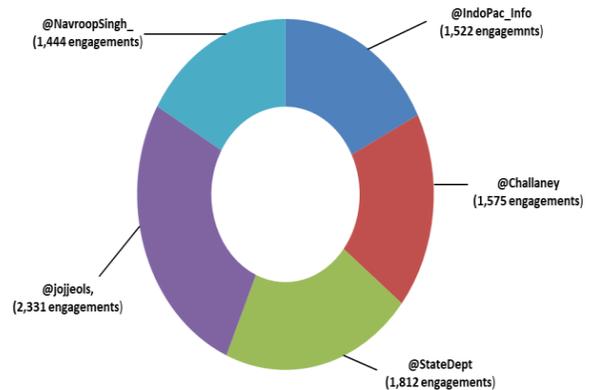
Terkait akun yang sering menarasikan isu Laut China Selatan, diatas adalah 5 akun yang mendapat retweet terbanyak. Pertama adalah @jojjeols, kedua adalah @StateDept. Artinya Negara-negara yang berkepentingan secara geopolitik pun sangat aktif memberikan narasi-narasi di sosial media twitter.



Sumber: diambil dari Drone Emprit

Melalui *Social Networking Analysis* dan lokasi dimana tweet itu berasal, isu laut China Selatan banyak dibicarakan di beberapa seperti India, US,

**TOP 5 INFLUENCERS: SOUTH CHINA SEA**

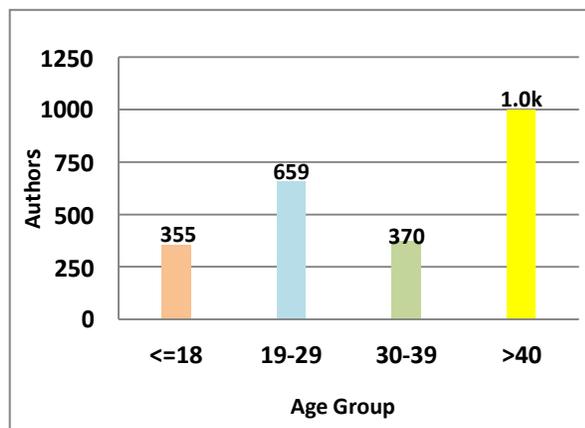


Sumber: diolah dari Drone Emprit

Menariknya, jika dilihat dari grafik total

penulis berdasarkan umur dan total postingan berdasarkan kelompok umur yang dipublikasi oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa isu dan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan saat ini kurang mendapat perhatian dari kalangan milenial, justru para generasi dengan umur >40 lah yang banyak angkat bicara, seperti beberapa pejabat publik dan influencer yang memberikan pandangannya terhadap kasus Laut China Selatan. Kurangnya minat dan perhatian dari kaum milenial ini dimungkinkan terjadi karena kembali memanasnya kasus tersebut bersamaan waktu dengan terjadinya wabah/pandemi besar COVID-19 di hampir seluruh belahan dunia. Sehingga fokus terhadap perang dingin terbuka yang dilakukan di kawasan Laut China Selatan kurang mendapatkan respon dari para generasi X dan Y, dan khususnya Jakarta yang menjadi kota dimana akun itu berasal juga, sebagian masyarakat atau netizen lebih fokus untuk mendiskusikan pandemic covid-19.

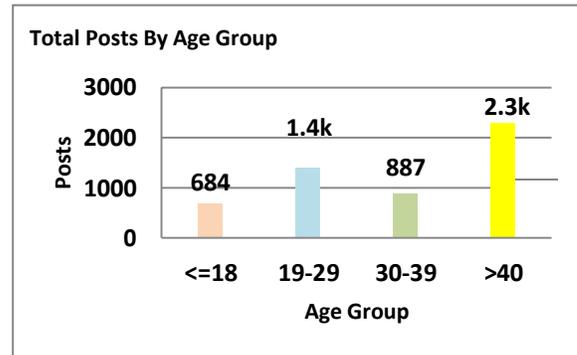
**Grafik 2. Total Penulis berdasarkan Umur**



Sumber: Adopsi dari Drone Emprit

**Grafik.3 Total Postingan Berdasarkan Kelompok**

**Umur**



Sumber: Adopsi dari Drone Emprit

Dari sekian akun yang membahas tentang isu Laut China Selatan terdapat penulis aktif mencapai 28.031 dan *author* yang teridentifikasi mencapai 2.412. Sementara jika dilihat dari asal kota dimana penulis/akun itu berada, sebarannya adalah sebagai berikut:



Disamping itu ini adalah beberapa kota dimana akun itu berasal yang sering membahas isu Laut China Selatan dengan total jumlah tweet.

**Tabel 1. Tweets berdasarkan Kota**

No	Kota	Jumlah Tweet
1	New Delhi	995
2	Mumbai	722
3	Hyderabad	251
4	London	206
5	Chennai	193
6	New York	157
7	Dubai	116
8	Melbourne	94



ditargetkan hingga tahun 2024, Indonesia melalui program *Minimum Essential Force* (MEF) kemudian memfokuskan pembangunan pangkalan militer, peningkatan kualitas pada sumber daya manusia dan pembelian serta modernisasi senjata untuk memenuhi postur kekuatan pokok pertahanan dan kondisi geografis kepulauan Indonesia. Adanya kekuatan potensi militer Indonesia ini kemudian dapat digunakan sebagai salah satu cara diplomasi dalam mencapai resolusi konflik pada kawasan Laut China Selatan.

Kawasan Indonesia yang strategis secara geopolitik dan ekonomi tentu menjadikan Indonesia sebagai jembatan utama bagi politik, pelayaran dan ekonomi antar benua. Sikap defensif kuat yang diambil Indonesia, merupakan langkah yang tepat karena kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang tidak bisa di prediksi kestabilannya, maka kekuatan militer yang offensif cenderung akan memanasakan kondisi dan situasi, dimana hal tersebut berpotensi meningkatkan terjadinya perang terbuka dikawasan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara telah menyebutkan bahwa pertahanan negara harus memperhatikan kondisi geografis dan mengedepankan pertahanan berlapis. Adanya konsep pertahanan berlapis ini salah satunya adalah dengan mengedepankan kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut (Paramasatya & Poespojoedho, 2019). Hal ini kemudian mengharuskan Indonesia untuk membangun

infrastruktur maritim yang baik, dan tercatat hingga tahun 2019 pemerintah telah membangun setidaknya 32 pelabuhan yang tersebar di penjuru Indonesia (Yasmin, 2018), dengan harapan akan mampu meningkatkan perkembangan ekonomi, kemudahan transportasi, distribusi logistik dan mobilisasi pertahanan negara.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sudah cukup siaga dalam konflik yang terjadi pada kawasan tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya upaya penjagaan yang dilakukan oleh angkatan laut dan angkatan udara dikawasan Laut Natuna (Sebayang, 2020a), Serta harapan Indonesia agar China tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 ini untuk menguasai klaimnya atas Laut China Selatan.

## **SIMPULAN**

Geopolitik kawasan Laut China Selatan telah menjadi isu yang selalu menarik untuk didiskusikan di level internasional. Konfrontasi dan saling klaim dari Negara-negara yang berkepentingan berpotensi mengancam stabilitas politik keamanan dunia, khususnya wilayah ASEAN. Dalam studi ini telah dijelaskan bahwa isu Laut China Selatan merupakan isu geopolitik yang telah berlangsung lama dan mempunyai historis masing-masing dari Negara pengklaim. Disisi lain, isu Laut China Selatan

telah menarik percakapan di sosial media, khususnya twitter. Namun, berdasarkan analisis sosial media yang diambil dari Drone Emprit menemukan bahwa Negara yang paling membicarakannya justru adalah India dan AS. Sementara posisi Indonesia konsisten pada politik luar negeri yaitu bebas aktif, sekaligus menghimbau kepada seluruh Negara yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Peran Indonesia sebagai penengah dan menjalankan strategi defensif dinilai tepat untuk mengurangi suhu konflik di wilayah Laut China Selatan. Implikasi dari studi ini adalah penggunaan Analisis sosial media ini dapat membantu memahami peta geopolitik di wilayah Laut China Selatan berdasarkan atensi masyarakat/pejabat public melalui sosial media twitter. Sehingga narasi yang dibangun oleh akun-akun pemerintah atau LSM yang berkepentingan dapat membantu analisa dari *policymaker*, terkhusus Indonesia dalam menyusun strategi apa yang tepat untuk meredam konflik secara terbuka. Kedepan studi melalui analisis sosial media ini bisa didiskusikan dalam aspek lain yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat di sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbar, T. F. (2020). *Pertanda Apa Ini? Panas dengan China, Taiwan Uji Coba Rudal*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200612163413-4-164996/pertanda-apa-ini-panas-dengan-china-taiwan-uji-coba-rudal>
- Bai, J., & Hu, H. (2016). Letter to the editors: Transcending divisions and harmonizing interests: How the arctic council experience can inform regional cooperation on environmental protection in the South China Sea. *Chinese Journal of International Law*, 15(4), 935–945. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw039>
- Blanchard, J. M. F., & Flint, C. (2017). The geopolitics of China's maritime silk road initiative. *Geopolitics*, 22(2), 223–245. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1291503>
- Chaudhury, D. R. (2020). *Australian, Chinese Envoys to India Engage in Twitter War Over South China Sea Claims*. [www.economictimes.com](http://www.economictimes.com).
- CNN Indonesia. (2020a). *AS Diduga Kerahkan Militer Intai Situasi Laut China Selatan*. [Cnnindonesia.Com](http://cnnindonesia.com).
- CNN Indonesia. (2020b). *Dubes China-Australia Debat Sengit Soal Laut China Selatan*. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).
- Fathun, L. M. (2017). Kebijakan Geopolitik Poros maritim di Era Jokowi. *Jurnal Power in International Relations*, 1(2), 1–29.
- Gau, M. S. T. (2012). The U-Shaped line and a categorization of the ocean disputes in the South China Sea. *Ocean Development and International Law*, 43(1), 57–69. <https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647499>
- Gonggong, A. (2017). Belajar dari Perjalanan Geopolitik Bangsa. *Swantara: Majalah Triwulanan Lemhanas RI*, VI(9), 6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Haro-de-Rosario, A., Sáez-Martín, A., & del Carmen Caba-Pérez, M. (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook? *New Media and Society*, 20(1), 29–49. <https://doi.org/10.1177/1461444816645652>
- Hayton, B. (2019). The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody. *Modern China*, 45(2), 127–170.

- <https://doi.org/10.1177/0097700418771678>  
Hindustan Times. (2020). *United State, China Hashtag Battle Over Carriers in South China Sea*. [www.hindustantimes.com](http://www.hindustantimes.com).
- Hochberg, L., & Sloan, G. (2017). Mackinder's Geopolitical Perspective Revisited. *Orbis*, 61(4), 575–592.  
<https://doi.org/10.1016/j.orbis.2017.08.007>
- Hsiao, A. H. A. (2017). The South China Sea Arbitration and Taiwan's Claim: Legal and Political Implications. *Journal of Chinese Political Science*, 22(2), 211–228.  
<https://doi.org/10.1007/s11366-017-9471-1>
- Huang, Y., & Suliman, S. (2020). Geopolitics, (Re)territorialisation, and China's Patriotic Tourism in the South China Sea. *Geopolitics*, 00(00), 1–24.  
<https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1784144>
- Jati, A. S. (2020). *Jumlah Pengguna Twitter Meningkat, Tapi... Inet*. Detik.Com.  
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-5001786/jumlah-pengguna-twitter-meningkat-tapi>
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Kim, D., Chun, H., Kwak, Y., & Nam, Y. (2014). The Employment of Dialogic Principles in Website, Facebook, and Twitter Platforms of Environmental Nonprofit Organizations. *Social Science Computer Review*.  
<https://doi.org/10.1177/0894439314525752>
- Li, X., & Chang, Y. C. (2019). Legal mechanism for the Sino-Foreign cooperative exploitation of the underwater cultural heritage in the South China Sea. *Ocean and Coastal Management*, 175(April), 144–151.  
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.04.004>
- Mainka, A., Hartmann, S., Stock, W. G., & Peters, I. (2014). Government and social media: A case study of 31 informational world cities. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*.  
<https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.219>
- Maksum, A. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 1–25.  
<https://doi.org/10.22219/v2i2.4398>
- Merdeka, R. (2020). *Amerika Paksa China Kayak Cacing Kepanasan*. Website.  
<https://rmco.id/baca-berita/internasional/38287/kerahkan-3-kapal-perang-ke-laut-china-selatan-amerika-paksa-china-kaya-cacing-kepanasan>
- Mitchell, M. D. (2016). The South China Sea: A Geopolitical Analysis. *Journal of Geography and Geology*, 8(3), 14.  
<https://doi.org/10.5539/jgg.v8n3p14>
- Nainggolan, P. P. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-25.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf)
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 245.  
<https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>
- Perez-Alvaro, E., & Forrest, C. (2018). Maritime archaeology and underwater cultural heritage in the disputed south China sea. *International Journal of Cultural Property*, 25(3), 375–401.  
<https://doi.org/10.1017/S0940739118000176>
- Politik, M. M. (2020). *Membedah Fakta Konfrontasi Militer Beijing-AS di Laut China Selatan*. Mata Mata Politik.  
<https://www.matamatapolitik.com/konfrontasi-militer-beijing-as-di-laut-china-selatan-fakta-dan-fiksi-in-depth/>
- Rafie, B. T. (2020). *Bersiap Menggepung Tiongkok di Laut China Selatan*. Internasional.Kontan.Co.Id.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan* (P. P. Nainggolan (ed.); Pertama). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan

- Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VIII(1). <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V8I1.880>
- Sebayang, R. (2020a). *Ancaman Perang di Laut China Selatan, Apa Kata Prabowo?* Cnbcindonesia.Com.
- Sebayang, R. (2020b). *Peluang AS-China Perang di Pasifik Makin Besar, Ini Buktinya!* Cnbcindonesia.Com.
- Suharso, P. (2019). Pemanfaatan Drone Emprit dalam Melihat Trend Perkembangan Bacaan Digital melalui Akun Twitter. *Anuva*, 3(4), 333–346.
- Suradinata, E. (2001). Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. In *Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Vol. 6, Issue 2, pp. 79–97). <https://doi.org/10.22146/jkn.22056>
- U.S Department of State. (2020). *U.S Position on Maritime Claims in the South China Sea*. <https://www.state.gov>.
- Vujakovic, P. (2020). The map is the story: the U - shaped line in western news media coverage of the geopolitics of the South China Sea . *International Journal of Cartography*, 6(2), 179–201. <https://doi.org/10.1080/23729333.2018.1541581>
- Yasmin, P. A. (2018). *Pemerintah Bangun 32 Pelabuhan Hingga 2019*. Finance.Detik.Com.
- Zhao, S. (2018). China and the South China sea arbitration: Geopolitics versus international law. *Journal of Contemporary China*, 27(109), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10670564.2017.1363012>